



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.225, 2014

KEMENPERIN. Regulator. Tabung Baja LPG.  
SNI. Pemberlakuan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 06/M-IND/PER/2/2014**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR  
TEKANAN TINGGI UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB PADA  
REGULATOR TEKANAN TINGGI TABUNG LPG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil industri Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG, melindungi konsumen dalam penggunaan Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG secara wajib pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib Pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKanan TINGGI UNTUK TABUNG**

## **BAJA LPG SECARA WAJIB PADA REGULATOR TEKANAN TINGGI TABUNG LPG.**

### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Produsen Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG adalah perusahaan yang memproduksi Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG dengan minimal melakukan proses cor tekan (*die casting*), pemangkasan sirip (*trimming*), permesinan, pengecatan, perakitan, dan pengujian untuk seluruh hasil produksi.**
- 2. Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG dengan tekanan keluaran maksimal 220 kPa pada saat pengatur tekanan keluar regulator dibuka maksimum.**
- 3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG yang sesuai dengan SNI.**
- 4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.**
- 5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG sesuai SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung Baja LPG.**
- 6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG sesuai spesifikasi/metode uji SNI.**
- 7. Sertifikat/Laporan Hasil Uji (SHU/LHU) adalah sertifikat/laporan hasil pengujian atas contoh Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG menurut spesifikasi, metode uji yang sesuai SNI.**
- 8. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.**

9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.
10. Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN dengan Badan Akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.
11. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
12. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.
16. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
17. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

#### Pasal 2

Memberlakukan SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung Baja LPG (SNI 7618:2012) secara wajib pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG dengan nomor Pos Tarif /HS code ex 8481.10.99.00.

#### Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG; serta

- b. memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

**Pasal 4**

- (1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Surat Pendaftaran Permohonan SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan sertifikasi Tipe 5, melalui:
  - a. pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratrium Penguji dimaksud berada yang mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement* (MRA)) dengan KAN (seperti *International Laboratory Accreditation* (ILAC) atau *The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC)), dan negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan:
  - a. Pernyataan diri penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008; atau
  - b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani



**Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) dengan KAN.**

- (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
- (7) LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi oleh KAN.

**Pasal 5**

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menerbitkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG dengan mencantumkan informasi minimal tentang:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. alamat pabrik;
- c. merek;
- d. nama penanggung jawab perusahaan;
- e. nama dan alamat importir;
- f. nomor dan judul SNI; dan
- g. jenis produk.

**Pasal 6**

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan perusahaan pemohon tentang:
  - a. penerbitan SPPT-SNI;
  - b. perpanjangan SPPT-SNI;
  - c. penundaan pemberian SPPT-SNI, bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi;
  - d. penolakan pemberian SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan
  - e. pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk, bila LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi;selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI atau penetapan atas hal-hal dimaksud .

- (2) Perusahaan pemohon SPPT-SNI yang mendapat penundaan pemberian SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan tindakan perbaikan.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab atas SPPT-SNI yang diterbitkan.

#### Pasal 7

Setiap Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diedarkan serta diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 8

- (1) Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Indonesia.
- (2) Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG dari produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG asal impor yang masuk daerah pabean Indonesia wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan oleh importir.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG secara wajib pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh PPSP.



- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 11**

**Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 12**

**Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG.**

#### **Pasal 13**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2014  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MOHAMAD S. HIDAYAT**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**